



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **2** TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menghitung Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian cara perhitungan dan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Wakatobi.

BAB III PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam APBD.
- (2) Penganggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa berpedoman pada rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 4

Alokasi anggaran Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk semua jenis pajak dan retribusi daerah.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 5

- (1) Tata cara penghitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa diatur secara merata dan proporsional.
- (2) Pengalokasian bagian dari dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi kepada Desa secara proporsional.

Pasal 6

- (1) Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah berdasarkan indikator prosentase realisasi pajak dan retribusi per desa terhadap total realisasi setoran pokok pajak bumi dan bangunan se-Kabupaten Wakatobi.

- (2) Pembagian dan tata cara pengalokasian ditetapkan dengan formulasi perhitungannya sebagai berikut:

BHPRD	= RPR x 10%
ABHPRM	= $\frac{\text{BHPR} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa}}$
ABHPRMP	= $\frac{\text{RPR per Desa}}{\sum \text{RPR Desa}} \times (40\%)$

Keterangan:

- BHPRD = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa
RPR = Realisasi Pajak dan Retribusi
ABHPRM = Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata
ABHPRMP = Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata Proporsional

BAB V PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sejumlah Rp908.816.700,00 (*sembilan ratus delapan juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah*) yang terdiri dari bagi hasil pajak daerah Rp772.284.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) dan retribusi daerah sebesar Rp136.532.700,00 (*seratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*) dengan rincian untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Penerimaan desa yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah harus dimasukkan dalam APBDesa masing-masing Desa sebagai sumber pendapatan desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 9





Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KEGABINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	
3	Ketis. Pengas	
4	Ketab. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **3 - 1 - 2022**

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **3 - 1 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2022 NOMOR **2**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 - 1 - 2022

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar			Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa	Alokasi Proporsional			Pagu Dana per-Desa		
			Pajak	Retribusi	Total		Pajak	Retribusi	Alokasi Proporsional	Pajak	Retribusi	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	WANGI-WANGI	SOMBU	6.178.272	1.092.264	7.270.536	5.273.405	3.649.110,87	645.130,62	3.649.110,87	9.827.300,00	1.737.400,00	11.564.700,00
2	WANGI-WANGI	WAHA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	6.606.405	4.571.525,28	808.205,35	4.571.525,28	10.749.800,00	1.900.500,00	12.650.300,00
3	WANGI-WANGI	TINDOI	6.178.272	1.092.264	7.270.536	7.037.551	4.869.871,33	860.950,30	4.869.871,33	11.048.200,00	1.953.300,00	13.001.500,00
4	WANGI-WANGI	MALEKO	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.490.684	2.415.496,80	427.038,53	2.415.496,80	8.593.800,00	1.519.400,00	10.113.200,00
5	WANGI-WANGI	LONGA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	6.247.603	4.323.240,11	764.310,72	4.323.240,11	10.501.600,00	1.856.600,00	12.358.200,00
6	WANGI-WANGI	PADA RAYA MAKMUR	6.178.272	1.092.264	7.270.536	31.677.977	21.920.647,11	3.875.377,08	21.920.647,11	28.099.000,00	4.967.700,00	33.066.700,00
7	WANGI-WANGI	WAEJUMU	6.178.272	1.092.264	7.270.536	10.521.216	7.280.511,10	1.287.130,15	7.280.511,10	13.458.800,00	2.379.400,00	15.838.200,00
8	WANGI-WANGI	PATUNO	6.178.272	1.092.264	7.270.536	24.466.385	16.930.342,22	2.993.135,19	16.930.342,22	23.108.700,00	4.085.400,00	27.194.100,00
9	WANGI-WANGI	WAGINOPO	6.178.272	1.092.264	7.270.536	5.567.014	3.852.283,54	681.049,75	3.852.283,54	10.030.600,00	1.773.400,00	11.804.000,00
10	WANGI-WANGI	TINDOI TIMUR	6.178.272	1.092.264	7.270.536	4.292.304	2.970.204,86	525.106,02	2.970.204,86	9.148.500,00	1.617.400,00	10.765.900,00
11	WANGI-WANGI	POSALU	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.169.408	2.193.179,01	387.734,71	2.193.179,01	8.371.500,00	1.480.000,00	9.851.500,00
12	WANGI-WANGI	KOROE ONOWA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	6.608.283	4.572.824,83	808.435,10	4.572.824,83	10.751.100,00	1.900.700,00	12.651.800,00
13	WANGI-WANGI	WAPIA-PIA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	5.026.502	3.478.257,99	614.925,34	3.478.257,99	9.656.600,00	1.707.200,00	11.363.800,00
14	WANGI-WANGI	POOKAMBUA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	2.035.129	1.408.276,31	248.970,83	1.408.276,31	7.586.600,00	1.341.300,00	8.927.900,00
15	KALEDUPA	SOMBANO	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.272.046	2.264.202,85	400.291,09	2.264.202,85	8.442.500,00	1.492.600,00	9.935.100,00
16	KALEDUPA	SAMABAHARI	6.178.272	1.092.264	7.270.536	7.166.656	4.959.209,90	876.744,57	4.959.209,90	11.137.500,00	1.969.100,00	13.106.600,00

17	KALEDUPA	OLLO	6.178.272	1.092.264	7.270.536	4.282.627	2.963.508,53	523.922,17	2.963.508,53	9.141.800,00	1.616.200,00	10.758.000,00
18	KALEDUPA	HORUO	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.101.551	2.146.223,07	379.433,31	2.146.223,07	8.324.500,00	1.471.700,00	9.796.200,00
19	KALEDUPA	BALASUNA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.600.000	2.491.141,70	440.411,88	2.491.141,70	8.669.500,00	1.532.700,00	10.202.200,00
20	KALEDUPA	MANTIGOLA MAKMUR	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.093.674	2.140.772,31	378.469,66	2.140.772,31	8.319.100,00	1.470.800,00	9.789.900,00
21	KALEDUPA	BALASUNA SELATAN	6.178.272	1.092.264	7.270.536	2.797.000	1.935.478,71	342.175,57	1.935.478,71	8.113.800,00	1.434.500,00	9.548.300,00
22	KALEDUPA	OLLO SELATAN	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.431.136	2.374.290,55	419.753,63	2.374.290,55	8.552.600,00	1.512.100,00	10.064.700,00
23	KALEDUPA	WADURI	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.005.269	2.079.597,48	367.654,49	2.079.597,48	8.257.900,00	1.460.000,00	9.717.900,00
24	KALEDUPA	LEWUTO	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.072.237	2.125.938,25	375.847,13	2.125.938,25	8.304.300,00	1.468.200,00	9.772.500,00
25	KALEDUPA	AMBEUA RAYA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	5.319.031	3.680.683,32	650.712,35	3.680.683,32	9.859.000,00	1.743.000,00	11.602.000,00
26	KALEDUPA	KALIMAS	6.178.272	1.092.264	7.270.536	5.812.240	4.021.975,96	711.049,88	4.021.975,96	10.200.300,00	1.803.400,00	12.003.700,00
27	TOMIA	WAITII BARAT	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.739.310	2.587.541,97	457.454,60	2.587.541,97	8.765.900,00	1.549.800,00	10.315.700,00
28	TOMIA	LAMANGGAU	6.178.272	1.092.264	7.270.536	24.314.631	16.825.330,91	2.974.570,11	16.825.330,91	23.003.700,00	4.066.900,00	27.070.600,00
29	TOMIA	WAITII	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.827.278	2.648.414,40	468.216,31	2.648.414,40	8.826.700,00	1.560.500,00	10.387.200,00
30	TOMIA	RUNDUMA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	2.241.968	1.551.405,55	274.274,82	1.551.405,55	7.729.700,00	1.366.600,00	9.096.300,00
31	TOMIA	PATUA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	1.951.800	1.350.613,99	238.776,64	1.350.613,99	7.528.900,00	1.331.100,00	8.860.000,00
32	TOMIA	TEEMOANE	6.178.272	1.092.264	7.270.536	4.897.421	3.388.936,03	599.134,00	3.388.936,03	9.567.300,00	1.691.400,00	11.258.700,00
33	TOMIA	KOLLO SOHA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	2.528.858	1.749.928,79	309.371,98	1.749.928,79	7.928.300,00	1.401.700,00	9.330.000,00
34	TOMIA	PATUA II	6.178.272	1.092.264	7.270.536	816.000	564.658,79	99.826,69	564.658,79	6.743.000,00	1.192.100,00	7.935.100,00
35	BINONGKO	MAKORO	6.178.272	1.092.264	7.270.536	7.893.500	5.462.174,18	965.664,22	5.462.174,18	11.640.500,00	2.058.000,00	13.698.500,00
36	BINONGKO	KAMPO-KAMPO	6.178.272	1.092.264	7.270.536	5.868.480	4.060.893,13	717.930,09	4.060.893,13	10.239.200,00	1.810.200,00	12.049.400,00
37	BINONGKO	LAGONGGA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	4.312.040	2.983.861,85	527.520,46	2.983.861,85	9.162.200,00	1.619.800,00	10.782.000,00
38	BINONGKO	PALAHIDU BARAT	6.178.272	1.092.264	7.270.536	2.178.896	1.507.760,75	266.558,80	1.507.760,75	7.686.100,00	1.358.900,00	9.045.000,00
39	BINONGKO	JAYA MAKMUR	6.178.272	1.092.264	7.270.536	2.327.453	1.610.559,79	284.732,77	1.610.559,79	7.788.900,00	1.376.900,00	9.165.800,00

40	WANGI WANGI SELATAN	KAPOTA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	5.616.487	3.886.518,05	687.102,11	3.886.518,05	10.064.700,00	1.779.400,00	11.844.100,00
41	WANGI WANGI SELATAN	KOMALA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	6.045.445	4.183.350,04	739.579,39	4.183.350,04	10.361.600,00	1.831.900,00	12.193.500,00
42	WANGI WANGI SELATAN	WUNGKA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	5.792.387	4.008.238,01	708.621,13	4.008.238,01	10.186.500,00	1.800.900,00	11.987.400,00
43	WANGI WANGI SELATAN	MATAHORA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	22.319.901	15.445.010,06	2.730.541,56	15.445.010,06	21.623.200,00	3.822.900,00	25.446.100,00
44	WANGI WANGI SELATAN	KABITA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	5.757.136	3.983.844,88	704.308,64	3.983.844,88	10.162.200,00	1.796.500,00	11.958.700,00
45	WANGI WANGI SELATAN	MOLA UTARA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.504.945	2.425.365,18	428.783,17	2.425.365,18	8.603.600,00	1.521.000,00	10.124.600,00
46	WANGI WANGI SELATAN	MOLA SELATAN	6.178.272	1.092.264	7.270.536	6.810.134	4.712.502,45	833.128,87	4.712.502,45	10.890.700,00	1.925.300,00	12.816.000,00
47	WANGI WANGI SELATAN	NUMANA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	22.666.155	15.684.612,22	2.772.901,11	15.684.612,22	21.862.800,00	3.865.100,00	25.727.900,00
48	WANGI WANGI SELATAN	LIYA MAWI	6.178.272	1.092.264	7.270.536	9.186.566	6.356.954,91	1.123.853,56	6.356.954,91	12.535.200,00	2.216.100,00	14.751.300,00
49	WANGI WANGI SELATAN	LIYA TOGO	6.178.272	1.092.264	7.270.536	8.291.704	5.737.724,90	1.014.379,16	5.737.724,90	11.915.900,00	2.106.600,00	14.022.500,00
50	WANGI WANGI SELATAN	KAPOTA UTARA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	8.061.517	5.578.439,22	986.218,85	5.578.439,22	11.756.700,00	2.078.400,00	13.835.100,00
51	WANGI WANGI SELATAN	KABITA TOGO	6.178.272	1.092.264	7.270.536	4.119.113	2.850.359,49	503.918,42	2.850.359,49	9.028.600,00	1.596.100,00	10.624.700,00
52	WANGI WANGI SELATAN	LIYA ONEMAE LANGKA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	12.259.854	8.483.620,44	1.499.829,27	8.483.620,44	14.661.800,00	2.592.000,00	17.253.800,00
53	WANGI WANGI SELATAN	WISATA KOLO	6.178.272	1.092.264	7.270.536	4.041.927	2.796.948,03	494.475,74	2.796.948,03	8.975.200,00	1.586.700,00	10.561.900,00
54	WANGI WANGI SELATAN	MOLA SAMATURU	6.178.272	1.092.264	7.270.536	4.011.963	2.776.213,43	490.810,05	2.776.213,43	8.954.400,00	1.583.000,00	10.537.400,00
55	WANGI WANGI SELATAN	MOLA BAHARI	6.178.272	1.092.264	7.270.536	4.209.425	2.912.853,93	514.966,89	2.912.853,93	9.091.100,00	1.607.200,00	10.698.300,00
56	WANGI WANGI SELATAN	MOLA NELAYAN BHAKTI	6.178.272	1.092.264	7.270.536	5.622.168	3.890.449,21	687.797,11	3.890.449,21	10.068.700,00	1.780.000,00	11.848.700,00
57	WANGI WANGI SELATAN	LIYA BAHARI INDAH	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.599.729	2.490.954,18	440.378,73	2.490.954,18	8.669.200,00	1.532.600,00	10.201.800,00
58	KALEDUPA SELATAN	TAMPARA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	4.676.721	3.236.215,20	572.134,31	3.236.215,20	9.414.400,00	1.664.300,00	11.078.700,00
59	KALEDUPA SELATAN	KASWARI	6.178.272	1.092.264	7.270.536	2.647.949	1.832.337,83	323.941,17	1.832.337,83	8.010.600,00	1.416.200,00	9.426.800,00
60	KALEDUPA SELATAN	PAJAM	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.882.240	2.686.447,21	474.940,17	2.686.447,21	8.864.700,00	1.567.200,00	10.431.900,00
61	KALEDUPA SELATAN	LANGGE	6.178.272	1.092.264	7.270.536	5.374.369	3.718.976,32	657.482,21	3.718.976,32	9.897.200,00	1.749.700,00	11.646.900,00
62	KALEDUPA SELATAN	TANOMEHA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	2.753.646	1.905.478,44	336.871,78	1.905.478,44	8.083.700,00	1.429.100,00	9.512.800,00

63	KALEDUPA SELATAN	LENTEA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.769.746	2.608.603,19	461.178,04	2.608.603,19	8.786.800,00	1.553.400,00	10.340.200,00
64	KALEDUPA SELATAN	DARAWA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	2.399.519	1.660.428,29	293.549,08	1.660.428,29	7.838.700,00	1.385.800,00	9.224.500,00
65	KALEDUPA SELATAN	SANDI	6.178.272	1.092.264	7.270.536	5.443.965	3.767.135,62	665.996,35	3.767.135,62	9.945.500,00	1.758.200,00	11.703.700,00
66	KALEDUPA SELATAN	PEROPA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.717.362	2.572.354,31	454.769,55	2.572.354,31	8.750.600,00	1.547.000,00	10.297.600,00
67	KALEDUPA SELATAN	TANJUNG	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.904.165	2.701.618,96	477.622,40	2.701.618,96	8.879.800,00	1.569.800,00	10.449.600,00
68	TOMIA TIMUR	TIMU	6.178.272	1.092.264	7.270.536	5.389.678	3.729.569,90	659.355,06	3.729.569,90	9.907.800,00	1.751.600,00	11.659.400,00
69	TOMIA TIMUR	DETE	6.178.272	1.092.264	7.270.536	2.482.265	1.717.687,18	303.671,94	1.717.687,18	7.895.900,00	1.395.900,00	9.291.800,00
70	TOMIA TIMUR	KULATI	6.178.272	1.092.264	7.270.536	2.994.741	2.072.312,28	366.366,53	2.072.312,28	8.250.500,00	1.458.600,00	9.709.100,00
71	TOMIA TIMUR	WAWAOTIMU	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.286.639	2.274.300,97	402.076,35	2.274.300,97	8.452.500,00	1.494.300,00	9.946.800,00
72	TOMIA TIMUR	KAHIYANGA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	4.170.000	2.885.572,47	510.143,76	2.885.572,47	9.063.800,00	1.602.400,00	10.666.200,00
73	TOGO BINONGKO	WALOINDI	6.178.272	1.092.264	7.270.536	4.995.763	3.456.987,10	611.164,83	3.456.987,10	9.635.200,00	1.703.400,00	11.338.600,00
74	TOGO BINONGKO	OIHU	6.178.272	1.092.264	7.270.536	3.274.409	2.265.838,00	400.580,18	2.265.838,00	8.444.100,00	1.492.800,00	9.936.900,00
75	TOGO BINONGKO	HAKA	6.178.272	1.092.264	7.270.536	2.466.682	1.706.904,00	301.765,57	1.706.904,00	7.884.800,00	1.393.400,00	9.278.200,00
TOTAL			463.370.400	81.919.800	545.290.200	446.417.383	308.913.600	54.613.200	308.913.600	772.284.000	136.532.700	908.816.700

PADAP KECERDASAN	
NO. BANTU/SATURAN/REKOR/PAKAF	
1	Sekretaris Daerah
2	Asisten Pemrintaha & Kesra
3	Ketis. Penges
4	Kodey. Akusun
5	

BUPATI WAKATOBİ,

[Signature]
HALANA